UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Relasi Eksekutif-Legislatif dalam Bingkai Presidensialisme Multipartai: Analisis Kritis Implementasi Politik Hukum dalam Revisi Undang-Undang KPK
Radea Basukarna Prawira Yudha, Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

A.V. Dicey. 1958. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (10th ed.). London: Macmillan.

Brian Z. Tamanaha. 2017. *A Realistic Theory of Law*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

C.F.G Sunaryati Hartono. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.

G. Marshall. 1971. *Constitutional Theory*. Claderon: Oxford University Press.

Gunawan A Tauda. 2012. *Komisi Negara Independen*. Yogyakarta: Genta Press.

Hanta Yuda AR. 2013. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema ke Kompromi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hens Kelsen. 2005. *Pure Theory of Law*. Clark, New Jersey: Lawbook Exchange.

Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari. 2007. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Relasi Eksekutif-Legislatif dalam Bingkai Presidensialisme Multipartai: Analisis Kritis Implementasi Politik Hukum dalam Revisi Undang-Undang KPK
Radea Basukarna Prawira Yudha, Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Konstitusi Press.

Jimly Asshiddiqie. 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Buana Ilmu.

Jimly Asshiddiqie. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

John Austin and Wilfrid E. Rumble. 1995. *The Province of Jurisprudence Determined*. New York: Cambridge University Press.

Jose A. Cheibub. 2007. *Presidentialism, Parliamentarism, and Democracy*. New York: Cambridge University Press.

Kuskridho Ambardi. 2009. *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Lexy J. Moeloeng. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosadakarya.

Maurice Duverger. 1954. *Political Parties, Their Organization and Activity in the Modern State*. London: Methuen.

Miriam Budiardjo. 2007. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Mohammad Mahfud MD. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok, Indonesia: Rajawali Pers.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Relasi Eksekutif-Legislatif dalam Bingkai Presidensialisme Multipartai: Analisis Kritis Implementasi Politik Hukum dalam Revisi Undang-Undang KPK
Radea Basukarna Prawira Yudha, Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Moh.Mahfud MD. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Murtir Jeddawi. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Total Media.

Padmo Wahjono. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Philippe Nonet and Philip Selznick. 2001. *Law & Society in Transition: Toward Responsive Law*. NewBrunswick, New Jersey: Transaction Publishers.

Robert A. Dahl. 1966. *Political Oppositions in Western Democracy*. New Haven, Connecticut: Yale University Press.

Roberto Mangabeira Unger. 2015. *The Critical Legal Studies Movement: Another Time, a Greater Task*. Brooklyn, New York: Verso.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sigit Pamungkas. 2011. *Sistem Kepartaian Indonesia: Perjalanan Penataan dan Pergeseran Pola*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Soehino. 2013. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.

Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Relasi Eksekutif-Legislatif dalam Bingkai Presidensialisme Multipartai: Analisis Kritis Implementasi Politik Hukum dalam Revisi Undang-Undang KPK
Radea Basukarna Prawira Yudha, Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sri Soemantri,. 2006. "Kedudukan, Kewenangan, dan Fungsi Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan RI." In *Bungai Rampai Satu Tahun Komisi Yudisial RI*. Jakarta: Komisi Yudisial, Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Zainal Arifin Mochtar. 2022. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Yogyakarta: Buku Mojok Group.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Relasi Eksekutif-Legislatif dalam Bingkai Presidensialisme Multipartai: Analisis Kritis Implementasi Politik Hukum dalam Revisi Undang-Undang KPK
Radea Basukarna Prawira Yudha, Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014.

Naskah Akademik dan Risalah

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Risalah Rapat Badan Legislasi DPR RI mengenai Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 12, 16, dan 17 September 2019.

Artikel

Bivitri Susanti. 2020. "Menyoal Independensi KPK Pasca Revisi UU KPK." *jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27 (1): 1-5.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Relasi Eksekutif-Legislatif dalam Bingkai Presidensialisme Multipartai: Analisis Kritis Implementasi Politik Hukum dalam Revisi Undang-Undang KPK
Radea Basukarna Prawira Yudha, Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Bomer Pasaribu. 2006. "The Politics of Law of the Development of Law and Regulations in Indonesia." *Indonesia Law Journal* 1, no. 1 (September): 4. National Law Development Agency, Ministry of Law and Human Rights of Republic in Indonesia.

Effendy, Hendi Budiaman, Meisha Poetri Perdana, Wildan Sany Prasetiya. 2023. "Implementasi Dan Permasalahan Mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 1 (Maret): 143–158.

Frenki, Hervin Yoki Pradikta. 2024. "Analisis Kondisi Koalisi dan Oposisi di Parlemen Pasca Pemilihan Umum dan Implikasinya terhadap Check and Balance." *Jurnal of Constitutional Law*. 4 (2).

Haposan Siallaga. 2015. "Problematics on Separation of Power Theory Implementation." *Jurnal Dinamika Hukum* 15 (3): 325.

H. L. A. Hart. 1958. "Positivism and the Separation of Law and Morals." *Harvard Law Review* 71, no. 4 (Februari): 593–629.

Jose Antonio Cheibub. 2002. "Minority Governments, Deadlock Situations, and the Survival of Presidential Democracies." *Comparative Political Studies* 35 (3): 284–312.

Juan J. Linz. 1990. "The Perils of Presidentialism." *Journal of Democracy* 1 (1): 51–69.

Kelik Iswandi, Nanik Prasetyoningsih. 2020. "Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia." *Jurnal Penegakkan Hukum dan Keadilan* 2 (1): 151.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Relasi Eksekutif-Legislatif dalam Bingkai Presidensialisme Multipartai: Analisis Kritis Implementasi Politik Hukum dalam Revisi Undang-Undang KPK
Radea Basukarna Prawira Yudha, Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Muhammad Habibi. 2020. "Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Cepalo* 4 (1): 435.

Padmo Wahjono. 1991. "Menyelisik Proses Terbentuknya Peraturan Perundang-Undangan," majalah. 29th ed. Forum Keadilan.

Transparency International Indonesia. 2025. *Indeks Persepsi Korupsi 2024: Korupsi, Demokrasi, dan Krisis Lingkungan*. Jakarta: Transparency International Indonesia.

Scott Mainwaring. 1993. "Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination." *Comparative Political Studies* 26 (2): 198–228.

Sherry R. Arnstein. 1969. "A Ladder of Citizen Participation." *Journal of the American Institute of Planners* 35 (4): 216–224.

Tanius Sebastian. 2023. "Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum Sebagai Moralitas." *Undang: Jurnal Hukum* 6 (1): 269–308.

Teuku Mohammad Radhie. 1973. "Pembaruan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional," dalam majalah. Prisma.

Zainal Arifin Mochtar. 2021. "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019." *Jurnal Konstitusi* 18 (2): 324-326.

Zainal Arifin Mochtar dan Idul Rishan. 2025. "Relevansi Studi Politik Hukum Mahfud MD dalam Perkembangan dan Kontekstualisasinya

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Relasi Eksekutif-Legislatif dalam Bingkai Presidensialisme Multipartai: Analisis Kritis Implementasi Politik Hukum dalam Revisi Undang-Undang KPK
Radea Basukarna Prawira Yudha, Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Pasca Demokratisasi di Indonesia." *Jurnal Mimbar Hukum* 37, no. 1 (Desember): 238.

Zulfan. 2018. "Analisis Pengaturan dan Praktik Pemisahan Kekuasaan Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Konstitusi." *Jurnal Media Hukum* 25 (1): 65.

Penelitian Ilmiah

Aditya Halimawan. 2023. *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Sleman, Yogyakarta.

Indonesia Corruption Watch. 2019. *Catatan Kritis Revisi Undang-Undang KPK*. Jakarta: ICW.

Kahfi Adlan Hafiz. 2020. *Urgensi dan Upaya Penyederhanaan Jumlah Partai Politik di DPR Dalam Undang-Undang Terkait Pemilihan Umum Pasca Reformasi untuk Menciptakan Efektivitas Penerapan Sistem Presidensial di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Sleman, Yogyakarta.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2023. *Laporan Tahunan KPK*. Jakarta: KPK RI.

Transparency International Indonesia. 2025. *Indeks Persepsi Korupsi 2024: Korupsi, Demokrasi, dan Krisis Lingkungan*. Jakarta: Transparency International Indonesia.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Relasi Eksekutif-Legislatif dalam Bingkai Presidensialisme Multipartai: Analisis Kritis Implementasi Politik Hukum dalam Revisi Undang-Undang KPK
Radea Basukarna Prawira Yudha, Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Internet

Desca Lidya Natalia. 2019. "KPK Tak Dilibatkan dalam Penyusunan Revisi UU KPK." *ANTARA News*, September 4, 2019. https://www.antaranews.com/berita/1045560/kpk-tak-dilibatkan-dalam-penyusunan-revisi-uu-kpk.

Dian Dewi Purnamasari. 2022. "Imbas Revisi UU KPK, Pakar: Pemberantasan Korupsi Melemah." *Kompas*. April 19, 2022. https://www.kompas.id/artikel/imbas-revisi-uu-kinerja-penindakan-kpk-terus-menurun.

Elza Astari Retaduari, "Fraksi PKB: Yang Menolak Revisi UU KPK Hanya Pencitraan", *Detiknews*, Februari 16, 2016, https://news.detik.com/berita/d-3143863/fraksi-pkb-yang-menolak-revisi-uu-kpk-hanya-pencitraan.

Fitria Chusna Farisa, Laksono Hari Wiwoho. 2019. "Hasil Lengkap Perolehan Kursi DPR 2019-2024." *Kompas.* Agustus 31, 2019, https://nasional.kompas.com/read/2019/08/31/11152361/hasil-lengkap-perolehan-kursi-dpr-2019-2024?page=all.

Ihsanuddin. 2019. "Nyatakan Sikap, Persatuan Guru Besar Indonesia Nilai Pembahasan Revisi UU KPK Tak Penuhi Prinsip Demokrasi." *Kompas.com*, September 13, 2019. https://nasional.kompas.com/read/2019/09/13/13313361/nyatakan-

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Relasi Eksekutif-Legislatif dalam Bingkai Presidensialisme Multipartai: Analisis Kritis Implementasi Politik Hukum dalam Revisi Undang-Undang KPK
Radea Basukarna Prawira Yudha, Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

sikap-persatuan-guru-besar-indonesia-nilai-pembahasan-revisi-uu-kpk.

Jefris Santama. 2017. "Mahasiswa USU Gelar Demo Tolak Revisi UU KPK." *detikNews*, Maret 17, 2017. https://news.detik.com/berita/d-3449552/mahasiswa-usu-gelar-demo-tolak-revisi-uu-kpk.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. "Teknokrasi", *KBBI Online*. https://kbbi.web.id/teknokrasi.

Muhammad Aminudin. 2019. "Tolak Revisi UU KPK, 73 Dosen Unand Teken Petisi, BEM Unsoed Turun Aksi." *detikNews*, September 9, 2019. https://news.detik.com/berita/d-4698379/tolak-revisi-uu-kpk-73-dosen-unand-teken-petisi-bem-unsoed-turun-aksi.

Muhammad Raihan Nugraha, 2025. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior". *Hukumonline*, Februari 6 2025. https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-lex-superior-lex-specialis-dan-lex-posterior-cl6806/.

Sania Mashabi, Bayu Galih. 2021. "Rangkuman Putusan MK soal UU KPK: 3 Perkara Ditolak, 3 Tak Diterima, 1 Dikabulkan Sebagian",, *Kompas.com*. Mei 5, 2021. https://nasional.kompas.com/read/2021/05/05/09354491/rangkuman-putusan-mk-soal-uu-kpk-3-perkara-ditolak-3-tak-diterima-1?page=all.

Tenri Wulan Aris. 2019. "Detik.com." Revisi UU KPK: Politik Hukum atau Politisasi Hukum?, September 17, 2019.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
Relasi Eksekutif-Legislatif dalam Bingkai Presidensialisme Multipartai: Analisis Kritis Implementasi Politik Hukum dalam Revisi Undang-Undang KPK
Radea Basukarna Prawira Yudha, Dr. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu, S.H., LL.M.
Universitas Gadjah Mada, 2026 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

https://news.detik.com/kolom/d-4709680/revisi-uu-kpk-politik-hukum-atau-politisasi-hukum.

Universitas Gadjah Mada. 2019. "Pakar Hukum UGM Desak DPR Tidak Merevisi UU KPK." *ugm.ac.id*, September 9, 2019. https://ugm.ac.id/id/berita/13547-pakar-hukum-ugm-desak-dpr-tidak-merevisi-uu-kpk/.

Yopi Makdori. "Peneliti LIPI: Revisi UU KPK Bentuk Kartel Politik di DPR." Liputan6.com, 10 September 2019. https://www.liputan6.com/news/read/4059212/peneliti-lipi-revisi-uu-kpk-bentuk-kartel-politik-di-dpr.